



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EDDY CHRISTIJANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **153852**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 676.000.000**

1. MOTOR, HONDA FICO2N28L (SCOOPY) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, VESPA GTS 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.847.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.315.300.236**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.638.300.236

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.638.300.236

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.